

## ABSTRAK

Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ada banyak macam koperasi, salah satu macam koperasi dikenal oleh masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memberikan anggotanya di bidang perkreditan. Terlebih dengan keadaan ekonomi sekarang, dampak dari pasca adanya *covid-19* yang menuntut pengusaha untuk mempunyai modal dalam melakukan usaha yang akan dijalankan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah masa musyawarah antara debitur dan kreditur yang disupervisi oleh pengadilan untuk memungkinkan debitur memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 383/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst memutus penolakan permohonan PKPU dan menganalisis akibat hukum putusan penolakan permohonan PKPU tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data sekunder dengan cara *legal search* yaitu dengan cara melakukan inventarisir peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, data di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbuiktinya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta debitur mempunyai lebih dari satu kreditur, maka ketentuan Pasal 8 ayat (4) telah terpenuhi dan Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dapat dinyatakan pailit, namun karena terhadap debitur juga telah diajukan dalam perkara PKPU yang lain yaitu perkara Nomor: 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt. Pst, dan perkara tersebut telah diputus dengan dikabulkan suatu gugatan, maka terhadap perkara *a quo* telah mendapatkan homologasi dan tidak mungkin diputus untuk kedua kalinya, sehingga Majelis Hakim menyatakan Permohonan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak. Akibat Hukum yang timbul dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.

Kata kunci : Penolakan Permohonan, PKPU, Koperasi Simpan Pinjam

## **ABSTRACT**

*Koperasi is based on the principles of economic movement based on family foundations. There are many types of cooperatives, one type of cooperation known by society is the Koperasi Simpan Pinjam (KSP) that provides its members in the field of credit. Moreover, with the current economic situation, the impact of the post-covid-19 existence requires entrepreneurs to have capital in doing the business that will be run. Delayed Debt Payment Obligation is a period of discontinuation between a debtor and a creditor supervised by a court to allow the debtor to correct his financial position and submit a peace plan that includes an offer to pay off part or all of the debt to his creditor. The purpose of this research is to analyze the consideration of the Law of the Chamber of Judges of the District Court of Jakarta Center No. 383/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst to discontinue the rejection of the application of the PKPU and to analyse the legal consequences of the decision of rejecting the application. The type of research used is normative jurisprudence, the approaches used in legal research are legal approaches, case approaches and conceptual approaches. Collection of primary data by means of legal search, i.e. by way of conducting inventory of laws and rulings of courts related to the legal issues faced, secondary data through carrying out library studies. Data is presented in the form of descriptions, data in the analysis qualitatively.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that According to Article 8(4) of the Treaty on the Functioning of the Republic of Kazakhstan, if the debtor has more than one creditor, the provision of paragraph 8(4) has been met, and the Company can be found liable. However, because the debtor has also been filed in another PKPU case—Case No. 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt. Pst—and that case has been terminated by accepting a lawsuit— A review of that may emerge from the new law.*

*Keywords: Rejection of Applications, Delayed Debt Payment Obligation, Payment of Loans*